

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**

2019

Jl. Soekarno-Hatta No. 50

Telp. 031-3095331

BANGKALAN 69116

Web : www.dispendukcapilbkl.com

eMail : dispendukcapil@bangkalankab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD), RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap

persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 25/E);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dan Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan 2019 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja 2019 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 serta evaluasi kinerja di tahun 2018 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2013-2018 dan RKPD.
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi aplikasi SIAK dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai bagi masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2019 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD
- 3.3. Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2018

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2018

Secara keseluruhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2018 sebesar Rp. 5.490.438.100,- dengan 5 program dan 21 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 506.712.136,- sehingga sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 4.948.935.868,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 90,14%.

2.1.2 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019

Sedangkan untuk rencana anggaran tahun depan yakni Anggaran tahun 2019 sesuai dengan usulan RKPD total Belanja Langsung sebesar Rp 5.922.958.500,- terurai dalam 5 program dan 23 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dalam menjalankan kegiatannya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi sehingga kemungkinan dalam melaksanakan visi dan misi menjadi kurang sempurna dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dikhususkan pada bidang pelayanan administrasi kependudukan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya jumlah pegawai teknis pelaksana sehingga kurang berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah yang ada untuk melayani pemohon.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan untuk bidang pelayanan masih kurang memadai sehingga pelaksanaan pelayanan dilingkungan Dispenduk dan Pencapil belum bisa dikatakan pelayanan prima.

d. Minat Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan relative masih rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat mengurus penerbitan dokumen kependudukannya pada saat dibutuhkan saja.

e. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas melalui pendidikan kader, maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh PD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Administrasi Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas. Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menangani dan mengelola 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi kependudukan
 - b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
 - c. Seksi Tata kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari
 - a. Seksi Kerjasama
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPENDUK PENCAPIL Kabupaten Bangkalan didukung oleh 110 orang Pegawai yang tersebar di masing-masing unit pelayanan, terdiri dari 59 orang Pegawai Negeri Sipil, 51 orang Pegawai Honorer. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 orang PNS, Eselon III/a sebanyak 1 orang PNS, Eselon III/b sebanyak 4 orang PNS dan Eselon IV/a sebanyak 15 orang PNS.

Pembangunan bidang administrasi kependudukan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan tersedianya jaringan pelayanan (aplikasi) SIAK Online masih kurang memadai sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pada sisi input dapat ditemukan beberapa persoalan. Pertama, persoalan SDM bidang administrasi kependudukan dalam hal kualifikasi teknis pendidikan masih kurang bila dibandingkan terhadap jumlah seluruh pegawai/tenaga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Kedua

ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu belum tersedianya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan satu pintu, hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan kepemilikan dokumen serta pengawasan dan pengendalian intern dinas masih belum terlaksana untuk capaian kinerja dinas.

Kecilnya anggaran biaya untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangkalan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan atau program tersebut secara keseluruhan, sehingga masih membutuhkan bantuan anggaran dari pusat dan propinsi demi tercapainya target SPM.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan Indikator Kinerja kunci.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawainya. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA

2. Fasilitas perkantoran untuk aparatur masih kurang, sejatinya setiap pegawai memiliki sebuah komputer untuk memudahkan pekerjaan mereka. Setiap pejabat struktural seharusnya memiliki sebuah laptop agar memudahkan mereka dalam mempersiapkan tugas yang diberikan atasan sehingga tidak ada antrian dalam penyelesaian tugasnya.
3. sarana prasarana yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas.
4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktifitas masyarakat keterlibatan pemerintah sangatlah penting.
5. Banyaknya masyarakat (pemohon) yang mengurus penerbitan dokumen kependudukan harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana penunjangnya, dan kinerja pelayanan masing-masing unit usaha sehingga peluang untuk meningkatkan PAD dapat optimal
6. Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dinilai masih rendah, hal ini ditandai dengan belum optimalnya pengembangan yang digunakan dan tingkat melek masyarakat terhadap TIK serta kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Tetapi dalam hal ini Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tidak memiliki usulan dari pemangku kepentingan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Propinsi

Sasaran renstra perhubungan Propinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah :

- 1) Melaksanakan tertib administrasi kependudukan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Renstra Perhubungan Propinsi Jawa Timur telah selaras dengan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan serta mendukung sasaran yang hendak dicapai, walaupun sasaran yang ingin dicapai lebih luas dan kompleks.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Tujuan disusunnya Renja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah untuk membangun sebuah Rencana sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

Untuk mewujudkan misi yang telah diuraikan diatas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1. Tujuan terlaksananya penerbitan dokumen administrasi kependudukan
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :
Tersedianya database kependudukan yang akurat dan informatif
2. Tujuan meningkatkan kualitas pelayan publik
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah:
Tercapainya standar pelayanan minimal (SPM)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diiringi oleh pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas terutama di bidang kependudukan dan catatan sipil. Rencana Program dan kegiatan Dikenduk dan Pencapil Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dispenduk Pencapil Tahun 2018

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018		Ket.
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ kegiatan s/d th 2018	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	12
0.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi		520.810.000	215.284.600	215.284.600		418.163.200			
0.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2						126.150.600			
0.00.02.47	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	30 Jenis	520.810.000	215.284.600	215.284.600		292.012.600			
0.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya		7.300.000	5.000.000	5.000.000		10.000.000			
0.00.06.01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	lakip, RKT, Perjanjian Kinerja, laporan Bulanan, Mingguan dan Triwulan	30 Dokumen	3.650.000	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000			

0.00.06.04	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	5 Dokumen	3.650.000	5.000.000	4.986.650	99,37%	5.000.000			
0.00.07	Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan		1.147.359.368	1.175.730.450	1.126.797.808		1.604.332.050			
0.00.07.01	Kegiatan Penunjang Operasional OPD	Tersedianya Sarana Operasional OPD	60 Bulan	1.137.410.718	1.120.295.450	1.071.617.808	95,65%	1.752.501.300			
0.00.07.49	Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan	Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan		3.560.000				15.000.000			
0.00.07.49	Penyusunan Renstra OPD	Review Renstra OPD						30.000.000			
0.00.07.60	Penyusunan dan evaluasi Renja OPD	Dokumen renja	5 Dokumen		5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000			
0.00.07.62	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	5 Dokumen	6.388.650	50.435.000	50.180.000	99,49%	50.435.000			
2.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Presentase Penduduk ber e-KTP, Presentase Keluarga yang memiliki KK, Presentase Bayi Berakte Kelahiran, Peresentase Pemeliharaan Sarana Pendukung SIAK, Peresentase Permintaan Data Kependudukan		509.911.766	533.647.286	515.912.392		2.906.848.600			

2.06.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Pengoperasian SIAK di Dispenduk Pencapil Kab. Bangkalan						253.850.000			
2.06.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Blanko Security dan non Security Akta capil dan Adminduk	93 %	280.161.066	289.686.850	277.495.192	95,79%	1.557.292.400			
2.06.15.09	Pengembangn data base kependudukan	Cetak Buku Profil	5 Dokumen	47.081.000	93.462.700	92.978.200	99,89%	86.687.150			
2.06.15.10	Penyusunan Kebijakan kependudukan	Perda Kependudukan						34.089.600			
2.06.15.12	Sosialisasi Kebijakan kependudukan	Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	36 Kecamatan	142.713.600				191.318.500			
2.06.15.18	Pemeliharaan SIAK Terpadu	Jasa Pemeliharaan SIAK di Kabupaten Bangkalan	60 Bulan	32.722.200	103.995.400	100.763.800	96,89%	42.669.700			
2.06.15.19	Pengadaan Perlengkapan SIAK Terpadu	Tersedianya Peralatan SIAK	55 Jenis					320.092.300			
2.06.15.20	Penyusunan Dokumen Standart Pelayanan Kependudukan	Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat	18 Dok	13.800.000				8.226.500			
2.06.15.21	Penyusunan Aplikasi Layanan Publik Bidang Kependudukan	Update Aplikasi Pendukung SIAK, Upgrade Sistem Mesin Antrian dan Aplikasi Web Service Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Paket		46.502.336	44.675.200	96,07%	45.883.200			

2.06.15.22	Operasional Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	Bertambahnya masyarakat yang memiliki akte kelahiran	80 %	7.233.900				104.497.300			
2.06.15.24	Pemanfaatan data kependudukan	Layanan Data Simkah	80 %					49.847.300			
2.06.15.25	Pencocokan dan penelitian rentan administrasi kependudukan	Pencocokan dan penelitian pendudukkependudukan	7 Kec					212.394.650			

Bangkalan, 02 Juli 2019
An. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangkalan
Sekretaris

Ir. R. Elly Farida
Pembina Tingkat I
NIP. 196401161993032002

Tabel 3.1
Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2019
Kabupaten Bangkalan

Kode Rekening			APBD 2019 (DPA PD TAHUN 2019)				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2019				Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Anggaran	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	8	9	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
	Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Presentase terpenuhinya layanan kesekretariatan Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia 1 Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia 2	Dispenduk dan Pencapil	6 Jenis 6 Jenis	1.525.282.650	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	6 Jenis 6 Jenis	1.528.957.650	DAUM	3.675.000	

	Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	<p>1 Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah yang dilaksanakan</p> <p>2 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah yang dilaksanakan</p>	Dispenduk dan Pencapil	<p>30 Kali</p> <p>8 Kali</p>	84.850.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	<p>30 Kali</p> <p>8 Kali</p>	84.850.000	DAUM	0	
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prasarana Aparatur yang dipelihara	Dispenduk dan Pencapil	4 Jenis	91.145.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	4 Jenis	91.145.000	DAUM	0	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	Dispenduk dan Pencapil	36 Unit	538.735.150	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	36 Unit	538.735.150	DAUM	0	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi/seminar	Dispenduk dan Pencapil	105 Orang	130.500.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	105 Orang	130.500.000	DAUM	0	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Dispenduk dan Pencapil	5 Dokumen	25.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	5 Dokumen	25.000.000	DAUM	0	
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	<p>1 Jumlah Laporan triwulanan monev PD yang tersusun (Renja/RKPD; APBD)</p> <p>2 Jumlah laporan kinerja PD yang tersusun.</p>	Dispenduk dan Pencapil	<p>12 Dok</p> <p>2 Dok</p>	75.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	<p>12 Dok</p> <p>2 Dok</p>	75.000.000	DAUM	0	

	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	5.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Dok	5.000.000	DAUM	0	
	Kegiatan Fasilitas Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi	Jumlah Peringatan hari jadi Bangkalan yang diikuti	Dispenduk dan Pencapil	1 Jenis	15.000.000	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	1 Jenis	15.000.000	DAUM	0	
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase penduduk ber KTP-el, Presentase Keluarga yang memiliki KK										
	Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk	1 Jumlah Blanko security dan Non security yang diadakan	Dispenduk dan Pencapil	5133350 Kpg/Lbr	1.937.101.550	DAK dan DAUM	Dispenduk dan Pencapil	5133350 Kpg/Lbr	2.091.071.550	DAK dan DAUM	122.770.000	Untuk Mendukung Program Pemerintah tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang harus terakomodir Tahun 2019
	Kegiatan Pelayanan Pindah Datang Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Dispenduk dan Pencapil	60 Orang	29.181.100	DAK	Dispenduk dan Pencapil	60 Orang	29.181.100	DAK	0	
	Kegiatan Pendataan Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi	Dispenduk dan Pencapil	7 Kecamatan	305 Org	DAK	Dispenduk dan Pencapil	305 Org	70.902.000	DAK	0	
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase bayi berakte kelahiran										
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Akta Kelahiran	1 Jumlah Blanko security dan Non security yang diadakan	Dispenduk dan Pencapil	358171 Kpg / Lbr	431.582.400	DAK dan DAUM	Dispenduk dan Pencapil	358171 Kpg / Lbr	431.582.400	DAK dan DAUM	6.081.000	
2 Jumlah Peserta Sosialisasi		72 Orang		72 Orang								

	Kegiatan Pelayanan Administrasi Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah Peserta Sosialisasi	Dispenduk dan Pencapil	56 Orang	22.860.850	DAK	Dispenduk dan Pencapil	56 Orang	22.860.850	DAK	(6.081.000)	
	Kegiatan Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Pencatatan Akta Kematian	Jumlah Peserta Sosialisasi	Dispenduk dan Pencapil	50 Orang	29.541.400	DAK	Dispenduk dan Pencapil	50 Orang	29.541.400	DAK	0	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pemeliharaan Sarana Pendukung SIAK										
	Kegiatan Pengelolaan dan Pelaksanaan SIAK	<p>1 Jumlah Peralatan SIAK yang diadakan</p> <p>2 Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik yang diadakan</p> <p>3 Pengoperasian SIAK di Dispenduk Pencapil Kab. Bangkalan</p>	Dispenduk dan Pencapil	<p>11 Jenis</p> <p>1 Pkt</p> <p>12 Bulan</p>	614.160.200	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	<p>11 Jenis</p> <p>1 Pkt</p> <p>12 Bulan</p>	614.160.200	DAUM	77.230.000	
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK yang dilatih	Dispenduk dan Pencapil	80 Orang	68.918.100	DAK	Dispenduk dan Pencapil	80 Orang	68.918.100	DAK	0	

	Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Buku Profil yang diadakan	Dispenduk dan Pencapil	2 Buku	85.279.600	DAK	Dispenduk dan Pencapil	2 Buku	85.279.600	DAK	0	
	Kegiatan Pemeliharaan SIAK	Jumlah Jasa Pemeliharaan SIAK yang dilaksanakan	Dispenduk dan Pencapil	12 Bulan	42.669.700	DAK	Dispenduk dan Pencapil	12 Bulan	42.669.700	DAK	0	
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	Presentase Permintaan Data Kependudukan yang terpenuhi										
	Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Dispenduk dan Pencapil	18 Kecamatan	44.575.000	DAK	Dispenduk dan Pencapil	18 Kecamatan	44.575.000	DAK	0	
	Kegiatan Pengembangan Inovasi	Jumlah Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat	Dispenduk dan Pencapil	3 Dokumen	8.226.500	DAUM	Dispenduk dan Pencapil	3 Dokumen	8.226.500	DAUM	0	
	Kegiatan Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan	Sinkronisasi Data Akte Kelahiran	Dispenduk dan Pencapil	80%	47.447.300	DAK	Dispenduk dan Pencapil	80%	47.447.300	DAK	0	
JUMLAH TOTAL					5.922.958.500				6.126.633.500		203.675.000	

Bangkalan, 02 Juli 2019
An. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangkalan
Sekretaris

Ir. R. Elly Farida
Pembina Tingkat I
NIP. 19640116 199303 2 002